

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB JASA RAHARJA
DITINJAU DARI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK,
PELAKSANAAN CSR DAN PEMBERIAN
DANA SANTUNAN
(Studi Kasus PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

**Oleh :
SEFIYANA ARIYANTI
B300152030 / I000152030**

**TWINNING PROGRAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Tugas Akhir dengan judul :
**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB JASA RAHARJA DITINJAU
DARI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK, PELAKSANAAN CSR
DAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN
(STUDI KASUS PT. JASA RAHARJA CABANG JAWA TENGAH)**

NASKAH PUBLIKASI

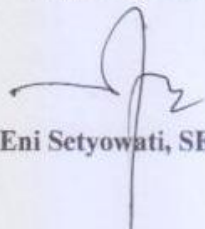
Yang ditulis oleh :

SEFIYANA ARIYANTI

B300152030 / I000152030

Telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji Oleh :

PEMBIMBING I



Eni Setyowati, SE., Msi

PEMBIMBING II



Drs. Harun., MH

HALAMAN PENGESAHAN


**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB JASA RAHARJA DITINJAU
DARI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK, PELAKSANAAN CSR
DAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN
(STUDI KASUS PT. JASA RAHARJA CABANG JAWA TENGAH)**

Yang ditulis oleh :

SEFIYANA ARIYANTI
B300152030 / I000152030

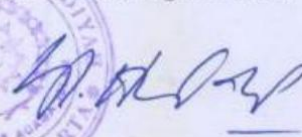
**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Jumuah, 08 November 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:**

1. Eni Setyowati, SE., M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Harun, MH
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Azhar Alam, S.Ec., M.SEI.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Syamsudin., M.M)
NIDN 017025701

Dekan Fakultas Agama Islam

(Dr. Syamsul Hidayat., M.Ag)
NIDN.0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran atas pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 November 2019

Penulis



Sefiyana Arivanti
B300152030 / I000152030

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB JASA RAHARJA DITINJAU
DARI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK, PELAKSANAAN
CSR DAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN
(Studi Kasus PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tanggung Jawab Jasa Raharja Ditinjau Dari Pelaksanaan Pelayanan Publik, Pelaksanaan CSR Dan Pemberian Dana Santunan . Penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan langsung dari hasil wawancara di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah dalam melaksanakan pelayanan publik telah terlaksana dengan baik berdasarkan pada UU No 33 Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No 34 Dana Kecelakaan Lalu Linta Jalan tahun 1964 Pelaksanaan CSR Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sudah teralisasi dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penyaluran dana santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan berdasarkan peraturan yang ada yaitu tetap sasaran, tepat jaminan. Sedangkan penyaluran adana santunan untuk korban meninggal dunia disalurkan berdasarkan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: pelayanan, pelaksanaan CSR, dana santunan.

Abstract

The Implementation of Jasa Raharja's Responsibility in Terms of Public Implementation, CSR Implementation and Providing Compensation Funds. Descriptive qualitative critical research. The data used are primary data obtained directly from interviews at PT. Jasa Raharja (Persero) Main Branch of Central Java. Based on the results of this study it can be concluded that in implementing the responsibilities of PT. Jasa Raharja (Persero) Branch of Central Java in carrying out public services has been carried out well based on Law No. 33 of the Mandatory Accident Funds for Passenger Accidents and Law No. 34 of the Road Traffic Accident Fund in 1964 The implementation of the Partnership and Community Development CSR Program has been well realized in accordance with the budget which has been specified. Distribution of compensation funds given to victims of accidents based on the following regulations is a fixed target, right Guarantee. While the distribution of compensation for death victims is provided based on inheritance law in force in Indonesia.

Keywords: services, CSR implementation, compensation funds.

1. PENDAHULUAN

Melalui PT. Jasa Raharja (Persero) pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas melalui pemberian santunan kepada korban kecelakaan tersebut apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan PT. JASA RAHARJA (PERSERO) adalah sebuah badan usaha milik (BUMN), yang oleh pemerintah dipercayakan untuk mengelola undang-undang UU.NO.33 Tahun 1964 juncto PP No. 17 Tahun 1965 tentang pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum (Darat, Laut, dan Udara) dan UU.NO.34 Tahun 1964 juncto PP No.18 tentang pelaksanaan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yaitu dana santunan yang dibayarkan kepada para korban dan atau ahli warisnya yang menjadi korban akibat ditabrak kendaraan bermotor di jalan.

Tugas pokok PT. Jasa Raharja selain memberikan pelayanan juga sebagai perusahaan besar wajib melaksanakan CSR. Pemerintah sebenarnya telah memberikan kemudahan kepada pengusaha kecil dalam rangka memperoleh modal, salah satunya ialah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pelaksanaan ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengharuskan BUMN untuk menyisihkan keuntungannya sebesar 2% dari laba bersihnya demi membantu permodalan bagi usaha kecil/koperasi serta pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility

(CSR) khususnya pada BUMN yang sejalan dengan Good Corporate Governance. Program ini terdiri atas dua subprogram, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Banyaknya masyarakat yang mengalami kecelakaan juga menjadikan PT. Jasa Raharja memberikan dana santunan bagi korban kecelakaan yang meninggal dunia. Pemberian dana santunan ini diberikan sesuai dengan hukum ada di Indonesia berdasarkan hukum adat dan fiqh mawaris. Sehingga dalam pemberian dana santunan ini haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB JASA RAHARJA DITINJAU DARI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK, PELAKSANAAN CSR DAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN (STUDI KASUS PT. JASA RAHARJA CABANG JAWA TENGAH).

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan langsung dari hasil wawancara di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Metode dalam memperoleh data atau mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data deskriptif model Miles dan Hubermans.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kecelakaan

PT. Jasa Raharja (Persero) yang mendapat amanah dari pemerintah untuk memberikan pelayanan jaminan sosial kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang dan Undang – Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak tanggung – tanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu terbukti dengan terus mengeksplorasi diri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

3.2 Implementasi Pelaksanaan CSR

Sesuai dengan Undang – Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) bahwa perusahaan harus melaksanakan CSR maka PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah telah berkomitmen untuk melaksanakan CSR yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Tujuan pelaksanaan CSR Program Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi UMKM yang dijalankan masyarakat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui program ini maka setiap UKM yang telah berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal.

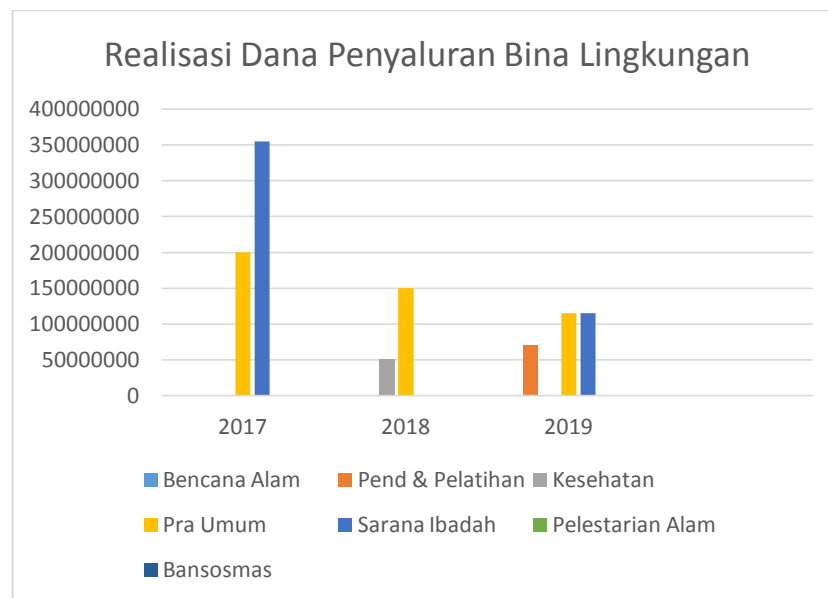
Menegaskan kembali bahwa BUMN dan anak perusahaannya wajib melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan. Kewajiban ini diikuti dengan wajib membentuk PKBL dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SPO) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Tabel 1. Realisasi Dana Penyaluran Bina Lingkungan

Penyaluran BL	Realisasi			Anggaran		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bencana Alam	-	-	-	-	-	-
Pendidikan & Pelatihan	-	-	70,000,000	-	-	125,000,000
Peningkatan Kesehatan	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-
Sarana & Prasarana umum	200,000,000	150,000,000	115,000,000	200,000,000	150,000,000	125,000,000
Sarana Ibadah	355,000,000	-	115,000,000	355,000,000	-	150,000,000
Pelestarian Alam	-	-	-	-	-	-
Bansosmas	-	-	-	-	-	-
Total	555,000,000	200,000,000	300,000,000	555,000,000	200,000,000	400,000,000

Sumber: Data Primer PT. Jasa Raharja Jawa Tengah

Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah telah berhasil mencapai target penyaluran di tahun 2017 dan 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 belum mencapai target, dikarenakan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 400.000.00 hanya terealisasi sebesar Rp. 300.000.000.



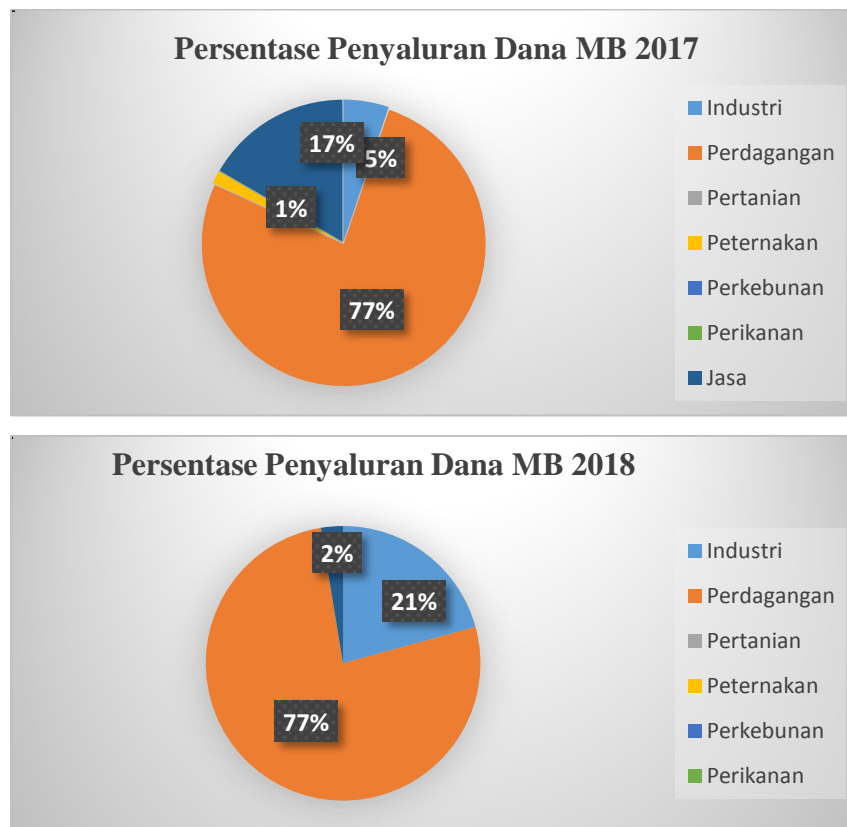
Gambar 1. Realiasi Dana Penyaluran BL Tahun 2017 – 2019
Sumber : Hasil Penelitian, September 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penyaluran dana bina lingkungan belum tersebar secara merata berdasarkan sasaran sektor bina lingkungan yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Realisasai Dana Penyaluran Mitra Binaan

Sektor Usaha	2017		2018	
	MB	Jumlah	MB	Jumlah
Industri	3	70,000,000	9	280,000,000
Perdagangan	52	1,035,000,000	47	1,035,000,000
Pertanian	-	-	-	-
Peternakan	1	20,000,000	-	-
Perkebunan	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-
Jasa	12	225,000,000	2	35,000,000
Total	68	1,350,000,000	58	1,350,000,000

Sumber: Data Primer PT. Jasa Raharja Jawa Tengah



Gambar 2. Persentase Realisasi Dana Penyaluran Mitra Binaan
Sumber : Hasil Penelitian, September 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana untuk mitra binaan pada tahun 2017 dan 2018 paling banyak didominasi oleh sektor perdagangan yang mencapai 77%. Sedangkan untuk sektor industri pada tahun 2017 mencapai 5% dan mengalami kenaikan di tahun 2018 mencapai 21 %. Untuk sektor perkebunan yang mulanya mencapai 17% mengalami penurunan menjadi 2% di tahun 2018. Dan terakhir sektor peternakan mendapatkan 1% hanya di tahun 2017.

3.3 Implementasi Pelaksanaan Pemberian Dana Santunan kepada Ahli Waris

Berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan bahwa besaran santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yang meninggal dunia akan mendapatkan jaminan sosial maksimal sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Konsep kepemilikan dalam harta waris tidak bertentangan dengan dana santunan Jasa

Raharja oleh karena itu dana santunan Jasa Raharja masuk dalam harta waris dan patut digunakan konsep waris dalam pembagiannya. Karena dana santunan Jasa Raharja adalah dana yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris.

PT. Jasa raharja (Persero) dalam UU No. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 dan UU No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 Pasal 12 telah menyebutkan siapa – siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hak atas kematian korban, yaitu anak – anak, janda/dudanya, dan orang tuanya. Berbeda dengan kebanyakan penjaminan atau asuransi lain mereka menetapkan ahli waris berdasarkan kesepakatan yaitu penunjukan oleh tertanggung. Hal ini berbeda dengan Jasa Raharja karena ahli warisnya ditentukan berdasarkan perundang – undangan.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965 sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Janda atau dudanya yang sah.
- b. Jika janda/dudanya yang sah tidak ada, maka kepada anak – anaknya yang sah.
- c. Jika janda/dudanya dan anak – anaknya yang sah tidak ada maka kepada orang tuanya yang sah.

Dalam Islam sendiri telah diatur urutan pewarisan dari tiga golongan, yaitu dimulai dengan *ashabul furud*, jika ada sisa warisan, maka diberikan kepada golongan *asabah*, dan jika tidak ada ahli waris dari golongan *asabah* maka diberikan kepada golongan *dzawil arham*. Jika ditinjau dari *fiqh mawaris*, maka penerima santunan Jasa Raharja ini tidak hanya pada anak – anak, janda/dudanya, dan atau orang tua saja yang selalu mewarisi, tapi dapat mewarisi secara bersama sesuai dengan bagian masing – masing, seperti:

- a. Santunan Jasa Raharja dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang termasuk dalam golongan *ashabul furud*, yaitu anak perempuan, ibu, bapak, istri atau suami dengan masing – masing bagian sesuai syara’.
- b. Jika masih terdapat sisa pembagian dalam golongan *ashabul furud*, maka dana santunan Jasa Raharja bisa dibagikan kembali kepada golongan *asabah* diantara ahli waris penerima dana santunan Jasa Raharja adalah:

- 1) Anak laki – laki yang pertama akan menerima sisa harta warisan tersebut.
 - 2) Bapak akan menerima sisa harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki – laki.
- c. Jika tidak ada asabah maka diberikan kepada golongan *dzawil arham*.

Dengan demikian setiap ahli waris akan menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya masing – masing sesuai syara', walaupun jumlah harta warisan dan ahli waris akan mempengaruhi besaran harta yang diterima.

4. PENUTUP

4.1 Pelaksanaan Undang – Undang No. 33 Tahun 1964 oleh PT. Jasa Raharja (Perseo)

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jaminan sosial. Guna melaksanakan Undang – Undang yang telah tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang ketentuan – ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Di dalam melaksanakan undang – undang dan Peraturan Pemerintah tersebut PT. Jasa Raharja (Persero) berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan umum. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Sebagai wujud tanggung Jawab PT. Jasa Raharaja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan Undang – Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tugas dan tanggung jawab nya adalah menghimpun dana melalui iuran dan sumbangan wajib. Iuran wajib di himpun melalui penumpang angkutan umum yang disertakan dalam pembayaran ongkos angkutan menjadi satu dengan karcis atau tiket. Karena pelaksanaannya tidak bisa dilakukan maka PT. Jasa Raharja (Persero) mempercayakan dengan Perusahaan

angkutan umum sebagai agen dan selanjutnya menyetorkannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero) setiap tanggal 27 pada setiap bulan. Sumbangan wajib di himpun melalui kantor SAMSAT pada Kabupaten/Kota dengan cara bekerja sama dengab Dinas Pendapatan Daerah dan menjadi satu dengan Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada setiap tahunnya. Akhirnya dana terhimpun tersebut dipergunakan sebagai:

- a. Dana operasional Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero)
- b. Dana Santunan Jaminan Sosial yang diberikan kepada korban atau ahli waris
- c. Dana disetor ke kas negara dalam rangka peran sertanya dalam pembangunan nasional.

4.2 Tanggung Jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan undang-undang No.34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas.

- a. Santunan jaminan sosial yang di berikan berwujud uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh keputusan menteri keuangan No.415/KMK.06/2001 dan No.416/KMK/06/2001 besarnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Ahli waris korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp.50.000.000
 - 2) Korban yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya di hitung berdasarkan angka prosesntase sebagai mana di tetapkan dalam pasal 10 ayat 3 peraturan pemerintah No.18 tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagai mana di maksud dalam huruh (A).
 - 3) Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak menerima santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 20.000.000
 - 4) Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas jalan yang tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan di berika penggantian biaya sebesar Rp. 4.000.000.Bahwa penggantian dana tersebut tidak akan di berikan kepada korban yang pada kecelakaan

berada dalam keadaan bunuh diri, percobaan pembunuhan atau kesengajaan lain, korban dalam keadaan mabuk, melakukan perbuatan kejahatan, atau karena korban mempunyai cacat badan

Pelaksanaan program CSR yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah melalui Program Kemitraan masih didominasi mitra binaan di sektor perdagangan sedangkan untuk bina lingkungan pada tahun 2019 belum mencapai target sesuai anggaran yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Anshari Ghofur, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Adnan Taufik Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, Mizan, Bandung, 1994.
- Ahmad Azizi Qodri, Memahami Hukum, Wawasan, 13 Januari 1990.
- Ali DM, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Alkostar Artijo, M Sholeh Amin, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Amir Sarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi, 1997, Fiqh Mawaris, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra
- Dewata, Mukti Fajar Nur. 2013. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi pada Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diah, Marwah M. 2003. Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementrian Pendidikan Nasional. 2010. Modul 3: Manajemen Usaha Kecil. Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ichsan, Achmad. 2000. Dunia Usaha Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Irma Devita Purnamasari. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah hukum Waris. Bandung: Penerbit Kaifa, 2012
- Kansil, C.S.T. dan Christine S. T. Kansil. 2005. Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) cet. 7. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Lubis. Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis Cekatan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Mubyarto. 2000. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nursahid, Fajar. 2006. Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia. Depok: PIRAMEDIA.
- Putra, Muhammad Imam Dani, Arifin Dwi Cahyono dan Gary Sakti Brilianto. 2015. Urgensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pertambangan terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum di Indonesia. Jurnal Privat Law. Edisi 06 November.
- Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Sunaryo. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, Masalah-masalah Hukum. Januari 2015. Jilid 44. Nomor
- Ulya, Zakiatul, 2016, *Penetapan Ahli waris Penerima Santunan Jsa Raharja Dalam PP No. 18 tahun 1965*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama